

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ke-12, Djambatan, Jakarta, 1999

_____, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008

Drs. Waskito, M, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jakarta, 2015

Florianus Sp Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta. Penerbit Visimedia, 2007

Jayadi Setiabudi, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*, Jakarta, Buku Pintar, 2015

Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta, 2018

Kurnia Warman dan Hengki Andora, *Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Mimbar Hukum, 2014.

Kurnia Warman, *Kedudukan Hak Ulayat dan Hak Komunal Dalam Hukum Agraria: Catatan Atas Permen ATR/BPN Nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu*, 2018.

Maria S.W. Sumardjono, *Aneka Masalah Hukum Agraria dan Pola Hubungan Hukum*, 2019.

Maruarar Siahaan, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat: Aspek Penting Pembangunan Indonesia Menuju Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Bandung, 2018

Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Kencana 2019

Myrna A. Safitri, *Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein Di Masa Kolonial dan Pengaruhnya dalam Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, 2010

Santoso, U, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Depok: Kencana, 2017

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

Waskito, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2019.

B. Jurnal dan Makalah

Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan “Ranah Hukum Tanah Adat/ Ulayat”, Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. IV, No.1, 2019

Hayatul Ismi,” Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No.1, Januari 2019

I Ketut Sudantara, ”Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/Kep-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman”, *Udayana Master Law Journal*, 2018

I Made Suwitra, “Konsep Komunal Religius sebagai Bahan Utama dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali”, *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 2 Vol. 15, 2010

_____,” Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat Di Bali,” *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Edisi Vol.4 No. 1, 2020

Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal El-Dusturie*, Edisi Vol. 1 No. 1, 2022.

Ria Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 55, 2011.

Santoso, U. ”Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perjanjangan Jangka Waktu).” *ADIL: Jurnal Hukum*, 2011.

Syuryani,” Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi”, *Menara Ilmu*, Vol. X Jilid 2 No. 73, 2016.

Tiarawati Poniskori, ”Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Pp Nomor 24 Tahun Tentang Pendaftaran Tanah. Manado,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi, 2017.

Zayanti Mandasari, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)", *Jurnal Hukum Ius Quia* Iustum No. 2 Vol. 22, Yogyakarta, 2014, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16522/tanah-ulayat/>

LAMPIRAN

A. Wawancara

Melakukan wawancara dengan Yance Arizona, Dosen Falkutas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Tata Negara, pada 15 Mei 2024, di Gedung Falkutas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Melakukan wawancara dengan Any Andjarwati, Dosen Falkutas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Agraria, pada 3 Juni 2024, melalui media zoom